

BAB 2

LANDASAN TEORI

Pada bab II ini penulis akan memaparkan beberapa teori yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Adanya landasan teori dimaksudkan sebagai acuan dan perbandingan dengan kajian dari skripsi ini. Berikut akan dijabarkan teori yang dipakai dalam penelitian ini.

2.1 Taman Bacaan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Taman Bacaan Masyarakat

Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu program nyata dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Taman Bacaan masyarakat atau TBM adalah salah satu wadah yang bergerak dibidang pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kembali minat baca masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, budaya, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

Menurut Sutarno NS (2006: 43) Taman Bacaan Rakyat atau Taman Bacaan Masyarakat merupakan salah satu embrio atau cikal bakal jenis perpustakaan umum yang berkembang di Indonesia. Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat dimulai ketika pemerintah pengembangan perpustakaan umum dengan maksud untuk mendukung program pemberantasan buta huruf (PBH). Perpustakaan yang

berbasis pada masyarakat (*community based library*). Taman Bacaan secara fisik memang bukan/belum dikatakan perpustakaan, meskipun memiliki fungsi yang tak berbeda, yakni sebagai sumber ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Selanjutnya Sutarno NS (2008: 127) menjelaskan:

“Taman Bacaan Masyarakat pada dasarnya bukanlah sebuah perpustakaan yang harus memenuhi standar nasional perpustakaan seperti standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan. Taman Bacaan Masyarakat lebih tepat disebut fasilitas membaca yang berada di tengah-tengah komunitas (*community based library*) dan dikelola secara sederhana, swakarsa, swadana dan swasembada oleh masyarakat yang bersangkutan”.

Departemen Direktori Pembinaan Pendidikan Masyarakat (2013: 4)
menggarisbawahi:

“Taman Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan sarana atau lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator”.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Taman Bacaan Masyarakat merupakan sarana atau lembaga yang bergerak dibidang pendidikan yang mengusung konsep sebagai perpustakaan berbasis pada masyarakat (*Community based library*) dengan maksud mendukung program pemberantasan buta huruf (PBH) yang menyediakan bahan bacaan sebagai sumber ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2.1.2 Tujuan Taman Bacaan Masyarakat

Taman Bacaan Masyarakat tergolong dalam kategori perpustakaan umum. Pada Pasal 4 UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Departemen Direktori Pembinaan Pendidikan Masyarakat (2013: 24) menggarisbawahi bahwa tujuan dari Taman Bacaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca.
2. Menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca.
3. Membangun masyarakat membaca dan belajar.
4. Mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
5. Mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya maju, dan beradab.

Sedangkan menurut Sutarno NS (2008: 130) tujuan Taman Bacaan Masyarakat dapat dikembangkan sebagai wahana berkumpul, belajar, berdialog antarwarga untuk memecahkan masalah secara bersama dan mengembangkan ide dan gagasan demi kemajuan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Taman Bacaan Masyarakat adalah memberikan layanan guna meningkatkan minat dan kegemaran membaca dengan mendorong masyarakat untuk belajar sepanjang hayat demi kemajuan masyarakat.

2.1.3 Fungsi Taman Bacaan Masyarakat

Dalam memenuhi perannya sebagai sumber belajar yang dapat memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, Taman Bacaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai tempat belajar dan mencari informasi yang dibutuhkan masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat yang tergolong dalam kategori perpustakaan maka berdasarkan Pasal 3 UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Sedangkan menurut Buku pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (Dalam artikel Rifazien, 2014), fungsi Taman Bacaan Masyarakat adalah :

1. Sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar mandiri, dan sebagai penunjang kurikulum program Pendidikan Luar Sekolah, khususnya program keaksaraan.
2. Sumber informasi yang bersumber dari buku dan bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan masyarakat setempat.
3. Sumber penelitian dengan menyediakan buku-buku dan bahan bacaan lainnya dalam studi kepustakaan.
4. Sumber rujukan yang menyediakan bahan referensi bagi pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.
5. Sumber hiburan (rekreatif) yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang sifatnya rekreatif untuk memanfaatkan waktu senggang untuk memperoleh pengetahuan/informasi baru yang menarik dan bermanfaat.

Berdasarkan penjabaran di atas maka fungsi Taman Bacaan Masyarakat adalah sebagai sarana pembelajaran, sumber informasi, sumber penelitian, sumber rujukan dan sumber rekreatif atau hiburan bagi masyarakat sekitar.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *empower*, yang juga dapat bermakna “pemberian kekuasaan” karena power bukan sekedar “daya” tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”. Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional menurut Onny. S. Prijono dan A.M.W Pranarka (1996: 97) adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, dengan kata lain memberdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Sedangkan menurut Sariffuddin (2011: 5) hakikat pembangunan yang sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhan dan dalam konteks yang lebih riil adalah peningkatan kesejahteraan yang baik. Kesejahteraan menjadi inti dari pembangunan yang selama ini didengung-dengungkan, karena pada dasarnya pembangunan itu sendiri adalah manusia yang berperan sebagai penikmat sekaligus pelaksana pembangunan. Jika kesejahteraan manusia terjamin maka besar kemungkinan keberlanjutan lingkungan hidup akan terjamin begitu pula sebaliknya. Hakikat tersebut merujuk pada definisi pembangunan menurut

Soemarwoto dalam Sariffudin (2011: 5) yang mengatakan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik.

Ditinjau dari perspektif pembangunan berdasarkan pemilihan teoritis, peristilahan, dan praktis Menurut Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugraha Dwijowojoto (2007: 2)

“Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat pula. Adanya alternatif-alternatif pembanguna yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan anatr generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadahi”.

Secara lebih rinci Slamet (Dalam Oos M Anwas, 2013: 49) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya. Sedangkan menurut Ife (Dalam Oos M Anwas, 2013: 49) mengatakan:

“Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya agar masyarakat mampu membangun dirinya dan kehidupannya dengan lebih baik lagi.

Konsep pemberdayaan jika ditelaah sebenarnya berangkat dari pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar

gerakan pemberdayaan ini mengamatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada kelompok yang tidak berdaya. Pada tahun 1990, pemberdayaan diyakini sebagai sebuah ‘pembangunan alternative’ atas model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan rakyat dan ditujukan untuk membangun kemandirian masyarakat.

Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Mengacu pada konsep pemberdayaan, Menurut Oon M Anwas (2013: 58) maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran.
3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan.
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat.
5. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Kegiatan pendampingan dan pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan.
7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara *holistic* terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning/education*).
10. Pemberdayaan perlu diperhatikan adanya keragaman budaya.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya.
12. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan, mulai dari berinovasi, berani mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan *networking* sebagai kemampuan yang diperlukan dalam era globalisasi.

13. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan yang cukup dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
14. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya.

Dalam pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan diberdayakan, dijelaskan bahwa pemberdayaan bukan hanya meliputi individu dan kelompok masyarakat lapisan bawah (*grassroots*), pinggiran (*peripheries*), dan pedesaan (*rural communities*) sebagai kelompok sasaran, tetapi NGOs sebagai pelaku dan kelompok atau organisasi juga perlu diberdayakan. Selain masyarakat kelompok sasarannya, NGOs pun perlu mempertahankan kemandirian dan keswadayaannya, serta diberi kebebasan untuk berkembang, supaya memiliki kekuatan sendiri tanpa perlu dibina dan dikontrol oleh pejabat pemerintah. NGOs sebagai agen perubahan (*agent of change*) berperan sebagai fasilitator pendidikan masyarakat, komunikasi bagi kepentingan masyarakat lapisan bawah, katalisator dan dinamisator transformasi sosial, serta mediator antara pemerintah atau lembaga lain (*bank*) dan masyarakat.

Menurut Ismawan (dalam Onny. S. Prijono dan A.M.W Pranarka, 1996: 106) Peran NGOs dalam proses pemberdayaan rakyat dapat diuraikan atau dirumuskan melalui pendidikan kemandirian dengan berperan sebagai berikut:

1. Fasilitator dan katalisator, yaitu melalui para Pembina yang tinggal ditengah-tengah kelompok menyertai proses perkembangan kelompok

masyarakat, membantu memecahkan masalah dan ikut menentukan alternatif pemecahan.

2. Pelatih dan pendidik, yaitu mencari dan menyalurkan informasi dan pengalaman dari luar ke dalam kelompok melalui berbagai metode belajar-mengajar.
3. Pemupuk modal antara lain dengan mendorong upaya-upaya penghematan, menabung, dan usaha produktif.
4. Penyelenggara proyek-proyek stimulan dalam meningkatkan kemandirian kelompok-kelompok swadaya seperti proyek teknologi tepat guna, proyek produksi dan pemasaran gaya PIR (Perusahaan Inti Rakyat), dan proyek infrastruktur lainnya.

Sedangkan menurut Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugraha Dwijowojoto (2007: 2) Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

1. Pada tahapan pertama adalah penyadaran, penyadaran disini yang menjadi target hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”.
2. Tahap kedua adalah pengkapasitasan, pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok seperti yang sering dilakukan banyak orang adalah seperti melakukan *training* (pelatihan), *workshop* (loka latih), seminar dan sejenisnya.
3. Pada tahap ketiga adalah pendayaan. Pada tahap ini pemberi daya itu sendiri atau “*empowerment*” dalam makna sempit, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan penerima.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun melembaga, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (*community-base development*) baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

2.2.2 Pemberdayaan Minat Baca

Pengembangan budaya baca masyarakat dilaksanakan melalui Taman Baca Masyarakat (TBM). Seperti pada pasal 49 UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Menurut Sudarsana (2015: 1.13) pembinaan dan pengembangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan, penyempurnaan, dan peningkatan. Secara spesifik sudarsana (2015: 1.13) mengatakan Pembinaan adalah usaha atau tindakan dari kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, dan berhasil guna. sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pembinaan adalah proses, pembuatan, cara membina, pembaharuan dan penyempurnaan.

Menurut Fuad Hasan (dalam Sutarno NS, 2003: 20) mengatakan :

“Dalam membudayakan membaca perlu adanya dorongan untuk membangkitkan minat baca masyarakat seperti kemampuan membaca, dan pendorong berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca, sedangkan kebiasaan membaca terpelihara dengan tersedianya bahan

bacaan yang baik, menarik, memadai, baik jenis, jumlah, maupun mutunya”.

Minat baca bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja pada diri seseorang, akan tetapi, minat baca dapat dipupuk dan dibina dari sejak dini. Menurut Sinambela (dalam Sudarsana, 2015: 1.11) minat membaca adalah sikap positif dan adanya rasa keterikatan dalam diri anak terhadap aktivitas membaca serta tertarik terhadap buku bacaan. Menurut Sudarsana (2015: 1.12) mengatakan:

“Minat membaca merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi dengan diri sendiri untuk menangkap makna yang terkandung dalam tulisan sehingga memberikan pengalaman emosi yang didapat akibat dari bentuk perhatian yang mendalam terhadap makna bacaan. Minat membaca adalah sumber motivasi kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya, yang merupakan pengalaman belajar yang menggembirakan dan akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya kelak dimasa yang akan datang”.

Dengan begitu, bagian dari proses pengembangan diri yang harus diasah sebab minat membaca tidak diperoleh dari lahir. Maka dengan hal tersebut minat membaca harus dilatih sejak dini.

Sudarsana (2015: 1.13) mengatakan tentang pembinaan minat baca adalah:

“Pembinaan minat baca adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat dengan cara memperbanyak dan menyebarluaskan secara merata jenis-jenis koleksi yang dipandang dapat meningkatkan minat dan kebiasaan membaca serta mendorong masyarakat untuk mendapatkan koleksi yang ada”.

Pembinaan minat baca seseorang atau sekelompok orang memerlukan suatu proses, waktu, kesabaran, dan usaha terus-menerus yang panjang. Tidak secara tiba-tiba atau instan. Menurut Sutarno NS (2006: 261) terjadinya minat dan budaya baca merupakan suatu proses sebagai berikut:

1. Adanya dasar pengertian bahwa membaca itu perlu.
2. Terpupuknya suatu kegemaran dan kesenangan.
3. Terbentuknya suatu kebiasaan membaca.
4. Terbentuknya suatu kondisi dimana membaca merupakan suatu kebutuhan.
5. Tersedianya sumber bacaan yang memadai.

Menurut Sutarno NS (2003: 21-22) terdapat beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat baca masyarakat seperti:

1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, pengetahuan, dan informasi.
2. Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya bahan bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam.
3. Keadaan lingkungan sosial yang kondusif, artinya dalam waktu tertentu dapat dimanfaatkan untuk membaca.
4. Rasa haus informasi, rasa ingin tahu, terutama yang aktual.
5. Berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani.

Mengembangkan minat baca seseorang atau masyarakat tertentu terdapat beberapa hal harus dikerjakan, menurut Sutarno NS (2006: 112)

1. Dimulai sejak usia dini.
2. Dilakukan terus-menerus.
3. Disediakan sumber bacaan yang memadai.
4. Dirasakan memperoleh manfaat.
5. Dilakukan secara bertahap.
6. Melibatkan pihak-pihak atau unsur-unsur yang terkait dan berkompeten dan bertanggung jawab.

Pembinaan minat baca masyarakat melalui Pemberdayaan dengan menekankan pada penciptaan lingkungan membaca untuk semua jenis bacaan, pada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan usia, pendidikan, kedudukan, dan sosial budaya seseorang. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sudarsana (2015: 1.14) tujuan khusus dari pembinaan minat baca adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan suatu sistem untuk penumbuhkembangan minat baca sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menyelenggarakan program penumbuhkembangan minat baca yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

3. Menumbuhkembangkan minat baca semua lapisan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyediakan berbagai jenis koleksi perpustakaan sebagai bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa perpustakaan.
5. Mengembangkan minat dan selera dalam membaca.
6. Terampil dalam menyeleksi dan menggunakan buku.
7. Mampu mengevaluasi materi bacaan dan memiliki kebiasaan efektif dalam membaca informasi.
8. Memiliki kesenangan dalam membaca.

Bahan bacaan yang cukup dan sesuai guna mengembangkan minat baca, kesenangan membaca, kebiasaan membaca, dan menciptakan budaya baca masyarakat. Selain harus dilakukan secara terus-menerus juga diperlukannya bahan bacaan yang memadai jumlah, Jenis, dan mutunya.

2.2.3 Kampung Literasi Sebagai Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahun 2016 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dik.Bindiktara) mengembangkan model pembelajaran keaksaraan yang komprehensif bukan hanya sekedar belajar membaca, menulis dan berhitung (calistung) akan tetapi dilakukan dengan menyediakan layanan pendidikan nonformal yakni Kampung Literasi. Kampung Literasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah rendahnya pengetahuan akibat minat baca yang kurang, rendahnya kreativitas, serta sulitnya akses informasi oleh masyarakat. Dengan menyediakan layanan pendidikan nonformal yakni kampung literasi supaya dapat memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat yang berada dalam kampung tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan konsep yang ada pada

kampung literasi dengan mengusung konsep *community based library*. Mengembangkan Layanan Perpustakaan Berbasis Kebutuhan terutama tentang perubahan sosial, memfasilitasi dan memberdayakan individu dan masyarakat; Memberi mereka informasi yang mereka butuhkan dan membantu menata bidang kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Dengan begitu layanan perpustakaan Berbasis Kebutuhan didasarkan pada asumsi bahwa setiap orang Memiliki kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan melibatkan seluruh masyarakat setempat.

Maka dengan itu, kampung literasi ditunjang sebagai salah satu tempat yang diberdayakan dengan memberikan layanan secara maksimal bagi masyarakat sekitar. Untuk itu kampung literasi dalam pemberdayaan dapat mengusung konsep sebagai *community based library* untuk menuju masyarakat berliterasi.

Menurut South Africa Government Gazette (dalam Olarongbe, Shuaib Agboola dan Ademolake, Hawwa Bolanle: 2) mengatakan "*community-based library and information services (CIS) is defined as library and information services established, funded or maintained by a province or municipality to provide library and information services to the public or community dwellers.*" Yang dapat diartikan perpustakaan berbasis masyarakat dan layanan informasi (CIS) didefinisikan sebagai perpustakaan dan layanan informasi yang didirikan, didanai atau dikelola oleh Provinsi atau kotamadya untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi kepada publik atau Masyarakat penghuni.

Perpustakaan dan layanan informasi berbasis masyarakat membantu Individu dan kelompok dengan pemecahan masalah sehari - hari dan dengan

partisipasi dalam Proses demokrasi Dalam hal ini, penyediaan perpustakaan berbasis masyarakat dan efektif Layanan informasi di masyarakat pedesaan yang memiliki potensi untuk menyediakan Informasi yang dibutuhkan dalam bahasa dan format yang tepat. Dengan memiliki tujuan utamanya meningkatkan tingkat buta huruf yang menyediakan akses terhadap informasi dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

2.3 Kampung Literasi

2.3.1 Konsep Kampung Literasi

Kampung literasi, menurut Jamaludin dari Dikmas P2PAUDNI (dalam artikel Agus M Irkham, 2015) merupakan satu upaya mewujudkan masyarakat berliterasi dengan makna luas. Yakni upaya memerdekakan masyarakat dari keniraksaraan agar memiliki pengetahuan serta pemahaman lebih luas. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat menggarisbawahi bahwa Kampung Literasi merupakan kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan, maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampung literasi adalah kampung untuk mewujudkan masyarakat yang berliterasi agar memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas.

Kampung literasi dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dengan dilaksanakan program kampung literasi, memiliki tujuan untuk mewujudkan

masyarakat yang melek informasi. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat (2016: 5) menggarisbawahi:

1. Menyediakan layanan informasi pada jalur pendidikan nonformal kepada masyarakat berupa buku maupun non-buku yang disediakan pada TBM, pojok baca, gardu baca, warung baca, yang dilengkapi dengan teknologi informasi.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.
3. Menyediakan informasi dan sumber akses informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, seni, hukum, ekonomi (pertanian, perikanan, perdagangan), kesehatan dan teknologi-informasi.

Penyelenggaraan program kampung literasi pasti membutuhkan hasil yang ingin dicapai, menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat (2016: 7) adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya layanan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa buku maupun non-buku yang tersedia pada TBM, pojok baca, gardu baca, warung baca, yang dilengkapi dengan teknologi informasi.
2. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap yang positif sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.
3. Tersedianya layanan informasi dan sumber akses informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, seni, hukum, ekonomi (pertanian, perikanan, perdagangan), kesehatan dan teknologi-informasi.

Dengan demikian, keberadaan Kampung Literasi dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup setiap anggota masyarakat dengan memiliki pandangan dan wawasan yang jauh kedepan agar perencanaan dan kemampuan individu untuk merancang dan mempersiapkan masa depan menjadi jauh lebih baik.

2.4 Perpustakaan Rumah

Pentingnya *home library* didalam hunian tentunya menambah rasa nyaman bagi penghuninya pada saat membaca dan menikmati buku kesayangan didalam rumah. Terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan banyak membaca. Menurut Savvino Alfredo (2013: 17) mengatakan dengan banyak membaca, yaitu lebih mudah mengetahui informasi terkini sekaligus dapat memperbanyak dan memperluas pengetahuan. Dengan banyak membaca, rasa keingintahuan pun semakin meningkat.

Dengan menghadirkan *home library* didalam hunian guna meningkatkan hobi membaca bagi penghuninya. Fasilitas itu diisi dengan berbagai jenis bacaan ringan atau pengetahuan umum untuk dibaca diwaktu yang senggang. Hadirnya *home library* didalam rumah tentunya akan memaksa mereka (penghuni) supaya rajin membaca buku dan merasa ingin tahu dengan hadirnya berbagai buku yang terdapat didalamnya.

Pemerintah daerah dan organisasi sosial di kota-kota besar seperti salah satunya adalah Jakarta yang banyak sekali orang bepergian atau mempunyai tingkat komuter yang tinggi, telah mulai dibangun rumah-rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat transit dan singgah sementara guna membina, menyediakan dan memberikan fasilitas berbagai jenis bacaan yang dapat dimanfaatkan oleh penghuninya.

2.5 Masyarakat Pedesaan

2.5.1 Karakteristik Masyarakat Pedesaan

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Menurut Raharjo dalam Kurnadi Shahab (2013: 11) ciri khas desa sebagai suatu komunitas pada masa lalu selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (*simplicity*), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian. Meskipun tak dapat digeneralisasikan pada semua pedesaan pada masa sekarang, namun ada sosiolog yang berhasil mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan. Sebagaimana dikatakan Roucek dan Warren, masyarakat pedesaan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Punya sifat homogen dalam (mata pencarian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam sikap dan tingkah laku).
2. Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kehidupan ekonomi rumah tangga.
3. Faktor goografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya, keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya.
4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada kota serta jumlah anak yang ada dalam keluarga ini lebih besar.

Hubungan di masyarakat pedesaan lebih bercorak pada *gemeinschaft* dan *gesellschaft*. Ferdinand Tonnies dalam Jabal Tarik Ibrahim (2002: 51) membagi ke dalam dua jenis kelompok, yaitu *gemeinschaft* dan *gesellschaft*.

1. *Gemeinschaft* (paguyuban)
Segala bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang kuat, alamiah, dan abadi. Seperti sebuah keluarga yang saling mencintai, saling mengisi, dan merasa susah apabila salah satu dari anggotanya sedang dilanda permasalahan. *Gemeinschaft* dapat terjadi karena didasari oleh tiga hal, yaitu:

- a. *Gemeinschaft by blood* adalah paguyuban yang mengacu pada hubungan darah atau ikatan kekeluargaan.
 - b. *Gemeinschaft by place* adalah paguyuban yang mengacu pada tempat tinggal yang berdekatan. Untuk kepentingannya mereka membuat kelompok yasinan, kelompok kematian, rukun tetangga, dan lain-lainn.
 - c. *Gemeinschaft by mind* adalah paguyuban yang mengacu pada hubungan persahabatan, mempunyai jiwa, pemikiran atau ideology yang sama.
2. *Gesellschaft* (Patembayan)
Merupakan ikatan lahir manusia yang bersifat mekanis dan bersifat sementara. Ikatan-ikatan perdagangan umumnya lebih bersifat *gesellschaft*. Hubungan antar manusia tercipta merupakan hubungan legal rasional saja.

2.5.2 Terbentuknya Masyarakat Pedesaan

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berkelompok atau berhubungan dengan manusia yang lain. Proses Terbentuknya Masyarakat Berdasarkan Pendekatan Interaksi Sosial. Menurut Soerjono Soekanto dalam Jabal Tarik Ibrahim (2002: 9)

“Interaksi Sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Dengan demikian, dalam interaksi sosial minimal terdapat dua orang yang mengadakan kontak. Pada tingkatan yang kompleks, kontak atau hubungan terjadi antara kelompok dengan kelompok”.

Dari pemahaman diatas dapat disampaikan bahwa interaksi sosial terjadi dengan adanya hubungan timbal balik baik individu maupun kelompok yang dilakukan dengan minimal dua orang.

Sedangkan menurut Gillin dan Gillin dalam Soejono Soekanto (2007: 55) mengatakan:

“Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Walaupun orang-orang yang bertemu muka tersebut tidak saling berbicara atau saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi, karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syarat orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan, dll. Semua itu menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya”.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut antara orang baik perorangan maupun kelompok. Dengan bertegur sapa menjadi salah satu aktivitas dari interaksi sosial.

Apabila dua orang saling bertemu maka dengan begitu terjadilah yang namanya interaksi sosial. Interaksi memberikan pengaruh kepada dua belah secara timbal balik maka terjadilah yang dinamakan proses sosial. Menurut Jabal Tarik Ibrahim (2013: 15) proses sosial merupakan pengaruh timbal balik yang terjadi karena orang berinteraksi secara individual dan kelompok. Secara garis besar macam-macam proses sosial dapat dibagi menjadi dua hal yaitu proses sosial yang bersifat assosiatif dan proses sosial yang bersifat dissosiatif. Berdasarkan pemaparan diatas, Jabal Tarik Ibrahim (2013: 15-22) menjelaskan proses sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Proses-proses Sosial Assosiatif

Beberapa proses sosial yang bersifat assosiatif adalah sebagai berikut:

a. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu interaksi orang-orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang sama atau bersama. Kerjasama timbul dikarenakan adanya tujuan yang sama, juga karena adanya faktor-faktor pembatas pada masing-masing pihak yang bekerjasama. Berikut bentuk-bentuk kerjasama masyarakat pedesaan yang bervariasi sifatnya antara lain gotong royong, tolong menolong, bargaining, dan lain-lain.

b. Asimilasi

Asimilasi adalah proses sosial yang timbul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, lambat laun tidak ada perbedaan antara individu dengan kelompok untuk mengurangi perbedaan tersebut. Usaha-usaha asimilasi meliputi mempererat kesatuan tindakan, sikap, perasaan dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

c. Akomodasi

Akomodasi adalah suatu proses dimana orang-orang atau kelompok yang saling bertentangan, berusaha mengadakan penyesuaian diri untuk meredakan atau mengatasi ketegangan. Bentuk akomodasi dalam masyarakat disebutkan seperti toleransi, kompromi, arbitrase, dan mediasi.

d. Akulturasi

Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri, sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing tersebut membaaur ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu.

2. Proses-proses Sosial Dissosiatif

Interaksi sosial yang bersifat dissosiatif mengarah kepada persaingan, pertentangan, dan pertengkaran. Berikut penjelasan dari beberapa proses sosial yang bersifat dissosiatif antara lain:

a. Persaingan (*Competition*)

Persaingan adalah suatu bentuk interaksi antara dua orang/kelompok atau lebih yang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan atau suatu barang yang sama. Kejadian persaingan dalam masyarakat modern hampir terjadi setiap saat. Misalnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan lain-lain.

b. Pertentangan

Pertentangan merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang terletak diantara persaingan dan konflik. Adanya kontroversi sering ditandai oleh timbulnya perasaan tidak suka yang tersembunyi, kebencian/kecurigaan, dan penghasutan satu sama lain.

c. Pertengkaran (*conflict*)

Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya dimana tujuan mereka yang bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman.

2.5.3 Perubahan Sosial Dalam Masyarakat pedesaan

Masyarakat pedesaan mempunyai sifat yang dinamis yang dalam arti masyarakat pedesaan mengalami yang namanya perubahan. Agar perubahan masyarakat pedesaan dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka pemerintah melakukan kegiatan perubahan yang direncanakan (*planned change*) melalui kegiatan pembangunan. Menurut Hartono dkk (1986: 1.3) pembangunan masyarakat adalah setiap usaha-usaha perbaikan, atau kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat setempat guna mencapai kondisi masyarakat setingkat lebih baik daripada kondisi yang mendahuluinya. Dengan begitu adanya kegiatan perubahan yang direncanakan. Menurut Hatta Sastramiharja (1987: 6.3) mengatakan:

“Perubahan sosial adalah suatu perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial termasuk didalamnya aspek kebudayaan seperti nilai-nilai, norma-norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap dan pola tingkah laku dalam masyarakat”.

Menurut Rislina F Sitompul (2009: 28) pada dasarnya perubahan sosial adalah variasi modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk sosial hingga yang paling mendalam terjadi perubahan budaya, yaitu norma, ide, dan cara bertindak dari suatu masyarakat. Sedangkan menurut Gillin dan Gillin dalam Kurnadi Shahab (2013: 12) perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis,

kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat secara singkat.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan berdasarkan pada beberapa aspek sosial yang dikarenakan oleh kondisi geografis dapat diperbaiki guna mencapai kondisi masyarakat setingkat lebih baik.

2.5.4 Faktor-Faktor Terjadinya Perubahan Sosial

Terjadinya suatu perubahan sosial yang ada didalam masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mendorong dan menghambat akan jalannya perubahan sosial. Menurut Hatta Sastramiharja (1987: 6.9) faktor pendorong adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran kebudayaan lain.
2. Masuknya kebudayaan lain.
3. Pendidikan yang tinggi .
4. Sikap yang menerima pada hal-hal baru.
5. Stratifikasi atau lapisan masyarakat yang terbuka.
6. Adanya rasa tidak puas dalam masyarakat.

Sedangkan menurut amatan Soerjono Soekanto dalam Kurnadi Shahab

(2013: 16) faktor-faktor yang mendorong proses perubahan sosial diantaranya meliputi:

1. Kontak dengan kebudayaan lain.
2. Sistem pendidikan formal yang maju.
3. Sikap menghargai hasil karya seseorang.
4. Keinginan untuk maju.
5. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*) yang bukan merupakan delik.
6. Sistem terbuka lapisan masyarakat.
7. Penduduk yang heterogen.
8. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
9. Orientasi ke masa depan.

10. Nilai bahwa manusia harus senantiasa ikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.

Perubahan-perubahan tak selamanya dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, Menurut Hatta Sastramiharja (1987: 6.9) terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya suatu perubahan sosial antara lain:

1. Adanya isolasi dari masyarakat lainnya.
2. Pendidikan yang rendah.
3. Sifat yang tradisional.
4. Adanya *vestes interest*.

Sedangkan menurut amatan Soerjono Soekanto dalam Kurnadi Shahab (2013: 16) faktor-faktor yang dapat menghambat proses perubahan sosial diantaranya meliputi:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
3. Sikap masyarakat yang tradisional.
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau *vested interest*.
5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
6. Prasangka atau sikap tertutup terhadap hal-hal baru atau asing.
7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
8. Adat atau kebiasaan yang kaku.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti halnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan.

2.5.5 Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan (*Rural Development*) dan pembangunan masyarakat (*Communtiy Development*) mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Oemar Said (Dalam Hatta Sastramihardja, 1987: 7.4)

“Pembangunan pedesaan merupakan kegiatan pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pedesaan yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai Departemen dan Non Departemen dengan aparat-aparatnya di daerah, sesuai dengan tugas pokok serta tanggung jawab masing-masing”.

Konsep pembangunan pedesaan dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat dirasakan dalam pembangunan pedesaan yang diidentifikasi oleh The Asian Centre for Development Administration (Aminuzzaman dalam Hatta Sastramihardja (1987: 7.6) terdapat 7 indikator dari pembangunan pedesaan yaitu:

1. Perubahan produktivitas pertanian.
2. Perubahan dalam ketenagakerjaan, pengangguran dan setengah pengangguran.
3. Perubahan dalam distribusi, kemakmuran dan pendapatan (*income*) menjadi 2 cara yaitu: (a) perubahan dalam *income* pada kelompok-kelompok yang berbeda pendapatnya, (b) perubahan pada sistem kepemilikan tanah.
4. Perubahan dalam distribusi kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*) serta partisipasi dalam pembuatan keputusan.
5. Perubahan tingkat mobilitas dalam struktur kelas setempat (*local*) sebagai refleksi dalam alokasi kedudukan seperti prestige, status dan kekuasaan berdasarkan prestasi (*achievement*) atau keturunan (*ascription*) serta perubahan-perubahan hambatan-hambatan dengan masuknya fasilitas-fasilitas umum.

6. Indikator-indikator kesejahteraan seperti perubahan dalam melek huruf (*literacy*), sekolah, tingkat kematian, harapan hidup (*life expectancy*), jalan-jalan pedesaan, jaringan listrik dan tingkat perbaikan gizi.
7. Perubahan dalam nilai-nilai (*value*), kepercayaan (*beliefs*) dan sikap.

Sedangkan menurut Hatta Sastramihardja (1987: 7.6) mengatakan dalam pembangunan pedesaan harus terdapat 3 macam perubahan yang terjadi secara bersamaan atau simultan yaitu antara lain:

1. Perubahan dalam sikap dan nilai-nilai masyarakat pedesaan baik secara ekonomi, sosial maupun politik.
2. Perubahan dalam sumber-sumber material dan teknologi.
3. Perubahan dalam organisasi, sistem pemilikan atau sistem kontrol yang sejajar dengan integrasi dari kelompok-kelompok yang marginal ke dalam masyarakat.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu merupakan suatu studi tentang pemberdayaan masyarakat disebuah komunitas atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pemberdayaan masyarakat di kampung literasi melalui program *One Home One Library*.

Penelitian pertama yaitu dari Gita Rizk Hastari (2015) jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Hidayullah, Jakarta. Penelitiannya berjudul “Kesuksesan Taman Baca Masyarakat Rumah Dunia Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Literasi Informasi”. Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang membedakan dalam penelitian ini terletak pada program dalam pemberdayaannya yaitu membahas tentang

program *One Home One Library* di kampung literasi . sedangkan Gita Rizki Hastari memfokuskan pada upaya TBM dan solusi mengatasi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat.

Penelitian kedua yaitu Lailil Ainun Jariyah (2013) dengan judul penelitian “Pemberdayaan Diri Masyarakat Pengguna Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Nusantara”. *Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji pemberdayaan pada masyarakat. Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini terletak pada tempat yang menjadi tempat penelitian.* Lailil Ainun Jariyah memilih Taman Bacaan Masyarakat (TBM) nusantara. Sedangkan penelitian saya lebih ke khusus Taman Bacaan Masyarakat Kuncup Mekar yang terletak di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta.

Penelitian ketiga yaitu Syamsul Bahri (2013) dengan judul penelitian “Peran TBM Cakruk Pintar dalam Pemberdayaan Masyarakat Nologaten Caturtunggal Sleman, Yogyakarta”. Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data berasal dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang membedakan pada penelitian ini terletak pada perumusan masalahnya. Peneliti membahas skripsi tentang program *One Home One Library* dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Syamsul Bahri membahas peran dan perubahan masyarakat setelah mengikuti pemberdayaan masyarakat.